

**OPINI MASYARAKAT KOTA PONTIANAK MENGENAI
SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) TAHUN AJARAN 2019/2020**

Oleh:

RIZKY ODHIE SAPUTRA^{1*}

NIM : E1101151049

Lina Sunyata² , Dewi Utami²

*Email : rizkyodhie@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Pada tahun 2019, Kemendikbud menerapkan sistem zonasi secara menyeluruh. Akan tetapi penerapan tersebut menimbulkan pro dan kontra dari para orang tua karena banyak dari mereka tidak bisa mendaftarkan anaknya ke sekolah karena terkendala jarak. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis opini masyarakat Kota Pontianak khususnya bagi orang tua calon siswa baru mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori kesenjangan pengetahuan dari Tichenor Donue, dan Olien (1970:169) dengan memperhatikan 5 aspek dalam teori tersebut yakni keterampilan komunikasi, jumlah informasi, status sosial ekonomi, penerimaan daya ingat selektif, media massa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang diambil adalah orang tua yang tinggal di Kecamatan Pontianak Timur yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah menengah atas (SMA) dengan memilih 3 orang yang berstatus sosial ekonomi rendah dan 3 orang berstatus sosial ekonomi tinggi. Dalam pemilihan informan, digunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan banyaknya informasi yang masuk maupun yang diolah oleh para informan. Informan berstatus sosial ekonomi rendah cenderung acuh tak acuh dengan informasi yang ada sehingga informasi yang didapat simpang siur sehingga opini yang dikeluarkan banyak salah paham. Sedangkan informan berstatus sosial ekonomi tinggi cukup aktif dan sangat antusias terhadap informasi mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sehingga informasi yang didapat akurat dan opini yang dikeluarkan dan dibincangkan kepada orang lain sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

Kata Kunci : Opini Masyarakat, Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru, Teori Kesenjangan Pengetahuan

ABSTRACT

In 2019, the Ministry of Education and Culture implemented a comprehensive zoning system. However, this implementation raised the pros and cons from parents because many of them could not enroll their children in school due to distance constraints. The writing of this undergraduate thesis aims to analyze the opinion of the people of Pontianak City, especially parents of prospective new students regarding the zoning system for new student admissions (PPDB) for the 2019/2020 academic year. The theory used to analyze is the knowledge gap theory of Tichenor Donue and Olien (1970: 169) by paying attention to 5 aspects in the theory, namely communication skills, amount of information, socioeconomic status, selective memory acceptance, mass media. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The informants were parents living in East Pontianak Sub-District who wanted to enroll their children to high schools (SMA) by choosing 3 informants with low socioeconomic status and 3 with high socioeconomic status. In selecting the informants, a purposive sampling technique was used. The results of this study showed that there were differences in the amount of information received and processed by the informants. The informants with low socioeconomic status tended to be indifferent to existing information so that the information obtained was confusing so that the opinions expressed were misunderstood. Meanwhile, the informants with high socioeconomic status were quite active and very enthusiastic about the information regarding the zoning system for the admission of new students so that the information obtained was accurate and the opinions expressed and discussed with others were in accordance with the reality.

Keywords: Public Opinion, New Student Admission Zoning System, Knowledge Gap Theory

*Translated by:
Tanjungpura University Language Center*



1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan peraturan tentang sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan untuk calon peserta didik baru yang ingin menempuh pendidikan sekolah, dimana cara untuk masuk ke sekolah tersebut diprioritaskan lebih kepada calon peserta didik yang dekat dengan zonasi tempat tinggalnya. Jarak tempat tinggal yang dimaksud adalah yang dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa/kelurahan menuju sekolah. Sistem zonasi ini tidak menggunakan nilai dari calon peserta didik, namun menggunakan jarak yang telah ditetapkan. Siswa yang rumahnya paling dekat dengan sekolah yang paling diutamakan untuk menjadi peserta didik dari sekolah tersebut.

Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur

PPDB pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun ajaran baru yang akan datang, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi kuota yang sebelumnya minimal 90% diubah menjadi jalur zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi kuota yang sebelumnya maksimal 5% diubah menjadi 15% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan orang tua peserta didik kuota tetap maksimal 5%.

Di Pontianak sendiri, sistem zonasi pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 menimbulkan keluhan dan protes dari orang tua pendaftar. Sistem yang diterapkan tersebut, dirasa tidak adil dan mengabaikan hak anak untuk memilih sekolah yang diinginkannya. Banyak orang tua murid yang protes diberlakukannya sistem zonasi tersebut. Misalnya yang dikutip dari Kumparan Pontianak kesaksian dari salah satu orang tua murid yaitu Sahrollah yang mendaftarkan anaknya di SMAN 3 Pontianak. "Sangat

mengecewakan kita, karena sistem zonasi ini menguntungkan yang dekat sekolah. Jadi mereka anak didik tidak ada motivasi untuk belajar jika dia dekat sekolah. Sedangkan nilai anak kita yang tinggi belum tentu dapat masuk,” (www.kumparan.com - Diakses Pada 20 Juli 2019). Seperti yang terlihat di lapangan banyak kekisruhan yang terjadi akibat diterapkannya sistem zonasi tersebut, banyak orang tua siswa yang sangat kecewa karena tidak bisa memasukan anaknya ke sekolah favorit. Kekisruhan tersebut seperti daya tampung sekolah hingga sistem pengukuran jarak rumah ke sekolah banyak terjadi kesalahan.

Permasalahan yang timbul tersebut diindikasikan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan Kemendikbud tentang sistem zonasi PPDB Tahun Ajaran 2019/2020. Dari hasil penglihatan yang peneliti lakukan di beberapa *media online* Kota Pontianak peneliti melihat memang masih minim sosialisasi tentang zonasi, seperti tentang pemberlakuan aturan jarak zonasi, di Kota Pontianak masih banyak orang

tua siswa yang tidak paham dengan penerapan jarak zonasi yang dikeluhkan oleh salah satu orang tua siswa yaitu Jimmy mengatakan “dalam aplikasi PPDB, jarak dari rumah ke sekolah menjadi 2 kilometer. Padahal sebenarnya 400 meter” (Cipta, 2019).

Sejumlah orang tua siswa mengeluh, ketika mereka mengecek jarak dari sekolah ke rumah mereka dengan Google Maps, hasilnya berbeda dengan hitungan jarak yang tertera pada aplikasi khusus sistem zonasi. Padahal, aplikasi tersebut merupakan hasil integrasi antara Kemendikbud dengan Google Maps. Hal ini disebabkan umpan balik dari komunikasi massa dalam mensosialisasi itu sangat terbatas. Ketika sebuah pesan diterima oleh *audience* dan menyita perhatiannya, kadang masih sulit untuk dimengerti. Sebagai mana komunikator dalam komunikasi antarpesonal, biasanya ia langsung mengetahui bahwa pesannya tidak bisa dimengerti (Nurudin, 2007:207). Karena minimnya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat, sehingga dalam

penerapannya terkesan mendadak dikarenakan masyarakat masih kurang informasi dari sistem PPDB tersebut.

Di Kota Pontianak sendiri masih banyak sekolah-sekolah yang masih belum merata peredarannya, salah satunya di daerah Kecamatan Pontianak Timur yang dimana daerah ini terdapat 3 SMA Negeri. Padahal dari data BAPPEDA Kota Pontianak tahun 2017, di Kecamatan Pontianak Timur merupakan daerah terpadat di Kota Pontianak, dengan luas wilayah 8,78 km², Kecamatan Pontianak Timur dihuni oleh 93.112 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 10.459 jiwa tiap km².

Dengan kepadatan penduduk seperti itu banyak sekolah yang tidak bisa menampung calon siswa. Hal ini penulis dapati ketika mewawancarai Samsudin, warga yang tinggal di Kelurahan Tambelan Sampit, ia mengatakan “Anak saye mau masuk ke SMAN 9, rupenye kuota disana udah penuh, teros anak saye dilempar ke SMAN 6” (Samsudin, wawancara, Juli 17 2019).

Penulis juga mewawancarai Nuardi yang tinggal di Kelurahan Dalam Bugis, ia mengatakan “Anak saye mau masuk ke SMA negeri, udah daftar di SMA 6 pon ndak bise masuk, kuata nye udah penuh, terpakse anak saye masukan ke sekolah swasta” (Nuardi, wawancara, Juli 17 2019).

Jika dilihat kedepan sistem zonasi ini sebenarnya memiliki prospek yang baik. Mendikbud menjelaskan bahwa sistem zonasi tidak hanya diterapkan untuk PPDB. Tetapi juga segala aspek pendidikan. Mulai identifikasi masalah, evaluasi kinerja dan pelatihan guru, hingga rotasi guru. Untuk kedepanya para pendidik akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang berbeda di dalam zona masing-masing. Dengan demikian, setiap sekolah akan memiliki guru-guru yang kompetensinya berimbang antara satu dan lainnya.

Sistem zonasi dapat membantu dalam memberikan bantuan sekolah agar lebih tepat sasaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah juga lebih mudah mengetahui sekolah yang memang

layak untuk mendapatkan bantuan. Dengan hal tersebut Pemerintah dapat fokus meningkatkan fasilitas sekolah yang memang kurang layak, seperti memberikan bantuan ke sekolah-sekolah pinggiran. Kebijakan ini membuka kesempatan yang luas tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pontianakpost.co.id - Diakses Pada 20 Juli 2019).

Dari fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui Opini Masyarakat Kota Pontianak Mengenai Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020. Seperti yang telah diungkapkan Kemendikbud bawah tahun 2020 yang akan datang, akan menerapkan lagi sistem zonasi. Maka dari itu jika Kemendikbud ingin mengetahui opini sistem zonasi yang diterapkan ini, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang dapat menguntungkan banyak pihak. Terlebih lagi Gubernur Sutardmidji akan mengusulkan penambahan jalur prestasi menjadi 50%.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintahan setempat untuk dapat menerapkan kebijakan pada PPDB tahun ajaran 2020-2021 yang akan datang.

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Opini Publik

Istilah opini publik biasanya akan mengacu ke setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu. Seperti yang dikemukakan oleh Santoso Sastropoetra (1990), istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk ke pendapat-pendapat kolektif sejumlah besar orang. Berbeda dengan kerumunan, publik lebih menekankan pada kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Menurut defenisi, publik merupakan sejumlah orang yang mempunyai minat, kepentingan, atau kegemaran yang sama.. Publik berinteraksi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi, pembicaraan pribadi yang berantai, desa-desus, surat kabar, radio, televisi, dan film. Alat-alat untuk menghubungkan ini memungkinkan publik mempunyai

pengikut yang lebih luas dan lebih besar jumlahnya.

Pembentukan opini juga dicetuskan oleh Robert Paul Abelson. Abelson adalah seorang psikolog dan ilmuwan politik yang tertarik dengan statistika dan logika. Ia berasumsi bahwa opini dibentuk dari tiga molekul/unsur, yaitu: *belief* (kepercayaan tentang sesuatu), *attitude* (apa yang sebenarnya dirasakan seseorang untuk dijadikan sikap), dan *perception* (sebuah proses pemberian makna).

B. Sistem Zonasi PPDB

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian,

sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem zonasi semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak “anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit.

Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada

setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

C. Jalur Sistem Zonasi PPDB 2019/2020

Jalur yang pertama merupakan jalur untuk calon peserta didik yang memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam zonasi (wilayah administrasi) yang ditetapkan. Jumlah peserta didik diterima paling sedikit adalah 90% dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. Calon peserta didik dalam program penanganan tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diterima

dengan kuota 20%. Data zonasi berdasarkan wilayah administrasi daerah yang dituangkan dalam bentuk pengelompokan daerah (zona 1 hingga 4) mulai dengan batas kelurahan, kecamatan, kab/kota dan jarak yang telah disepakati oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Khusus untuk sekolah yang berada di ibu kota kabupaten/kota bisa menggunakan jarak tempuh darat berdasarkan peta Google atau leaflet. Perhitungan jarak tempuh rute jalan darat menggunakan kendaraan bermotor antara domisili calon peserta didik dengan sekolah.

Jalur kedua adalah jalur prestasi yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi yang memiliki prestasi. Jumlah peserta didik diterima paling banyak adalah 5 % dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah, bersifat berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota,

provinsi sampai dengan nasional atau internasional.

Prestasi yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi akademik berupa nilai UN 10 besar tertinggi se-Kota/Kabupaten yang dibuktikan dengan piagam penghargaan oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kota/Kabupaten. Menyerahkan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui dan yang bekerjasama dengan pemerintah dengan menunjukkan aslinya.

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi dari sekolah dengan acuan perpindahan tugas orang tua/wali. Jumlah peserta didik yang diterima paling banyak adalah 5% dari total jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. Jika jalur perpindahan orang tua siswa tidak memenuhi kuota 5% maka kelebihan kuota akan diberikan kepada jalur berprestasi. Menyerahkan surat keterangan/surat tugas orang tua dari instansi terkait.

D. Alur Pendaftaran PPDB 2019/2020 Kota Pontianak

Secara umum, inilah jalur atau urutan tatacara pendaftaran PPDB SMA SMK di Kota Pontianak.

1. Pemilihan Sekolah Tujuan di wilayah Kota Pontianak.
2. Calon peserta didik mendaftar pada sekolah pilihan pertama.
3. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia.
4. Calon peserta didik baru pada sistem zonasi maupun jalur prestasi memilih 3 sekolah Negeri yang ada di Kota Pontianak.
5. Calon peserta didik yang berasal dari luar Kota Pontianak yang akan mendaftar harus membawa surat pindah rayon dari Dinas Pendidikan Kota dan melapor di Panitia PPDB Kota Pontianak.
6. Anak kandung Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diterima secara langsung pada satuan pendidikan

tempat orang tuanya bertugas dengan memenuhi persyaratan umum/khusus PPDB tahun 2019/2020 yang telah ditetapkan.

7. Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dinyatakan diterima, akan diverifikasi oleh tim dari sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari BOS Kota Pontianak.
8. Bagi siswa yang tidak diterima di satuan pendidikan negeri disarankan untuk masuk ke satuan pendidikan swasta, dan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu akan tetap diberikan bantuan biaya pendidikan melalui BOS Kota Pontianak setelah diverifikasi oleh tim.

E. Teori Kesenjangan Pengetahuan

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Phillip Tichenor,

George Donohue, dan Clarice Olien (1970:295). Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit.

Teori kesenjangan pengetahuan dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitik beratkan pada opini publik. Kesenjangan pengetahuan hasil penelitiannya lebih kepada kesenjangan antara orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah dan orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi.

Dalam kesenjangan pengetahuan, informasi sangat penting di masyarakat karena demokrasi tergantung pada warga negara yang mendapatkan informasi yang paling relevan. Masyarakat dituntut untuk mendapat informasi yang sebenar - benarnya. Seperti yang terjadi saat ini, mengenai sistem zonasi PPDB masih banyak masyarakat yang

kurang paham mengenai aturan jarak zonasi.

Informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat menyebabkan kesenjangan pengetahuan baik dari status sosial ekonomi yang lebih tinggi maupun yang rendah akan memperoleh ilmu pengetahuan karena informasi tambahan orang-orang dari status sosial yang lebih tinggi akan memperoleh lebih banyak informasi. Ini berarti bahwa kesenjangan relatif dalam ilmu pengetahuan antara orang berpunya dan orang yang kurang berpunya akan meningkat.

Dalam teori kesenjangan pengetahuan, dijelaskan ada faktor-faktor yang mempengaruhi informasi kesenjangan pengetahuan sehingga jika dianalisis dengan teori ini maka bisa diketahui alasan-alasan opini-opini yang pro kontra mengenai sistem zonasi PPDB 2019/2020. Sedangkan pada model difusi inovasi, hanya menjelaskan bagaimana seorang individu menerima dan meneruskan informasi yang diterima sehingga tidak bisa digali lebih dalam mengenai dasar-dasar opini mereka.

Tichenor Donue, dan Olien (1970:169) menyajikan lima penyebab kesenjangan pengetahuan, yaitu :

1. Terdapat perbedaan keterampilan komunikasi antara masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi rendah dan ekonomi tinggi. Perbedaan terbesar yakni pendidikan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang memadai membuat seseorang siap dalam memproses informasi seperti membaca, memahami, dan mengingat.

2. Terdapat perbedaan antara jumlah informasi yang disimpan atau latar belakang ilmu pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Masyarakat yang berasal dari status sosial ekonomi lebih tinggi mungkin sudah mengetahui sebuah topik melalui pendidikan, atau mungkin mereka mengetahui lebih banyak tentang topik itu melalui pelajaran yang didapat sebelumnya.

3. Orang dari status sosial ekonomi lebih tinggi mempunyai lebih banyak hubungan sosial yang relevan. Artinya, masyarakat

berstatus ekonomi yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan orang-orang yang juga terekspos pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan mungkin terlibat dalam diskusi mengenai topik-topik semacam itu dengan mereka. Oleh karena itu informasi yang didapat lebih akurat dan tidak berat sebelah.

4. Masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi lebih baik dalam melakukan terpaan selektif, penerimaan, dan retensi atas informasi yang ada. Akan tetapi orang dari status sosial ekonomi rendah mungkin tidak menemukan informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tepat dengan masyarakat atau berita-berita ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai atau sikap-sikap mereka, atau mereka mungkin tidak tertarik dengan informasi seperti itu.

5. Sifat dari sistem media massa itu sendiri disesuaikan dengan orang dari status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Banyak berita mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan ilmu pengetahuan terbit dalam

media cetak, dan media cetak berorientasi pada minat dan selera orang-orang dari status yang lebih tinggi. Hal ini membuat orang yang berstatus ekonomi lebih rendah kurang tertarik dengan informasi yang dipublikasikan media.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sehingga dapat dilakukan suatu analisis bahwa metode deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, melukiskan dan melaporkan suatu keadaan objek atau peristiwa tertentu yang terjadi di lapangan pada saat penelitian.

Penelitian deskriptif analisis ini diajukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mendefinisikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, mengumpulkan dan menampilkan data dari lapangan melalui observasi, wawancara untuk kemudian dianalisis. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Timur. Waktu penelitian dihitung dari sejak disahkannya proposal penelitian ini.

Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik “*purposive sampling*”. Informan dalam penelitian ini adalah orang tua

siswa yang tinggal di Kecamatan Pontianak Timur yang ingin

memasukan anaknya ke sekolah menengah atas (SMA). Sedangkan

yang menjadi objek penelitian yaitu opini publik yang terbentuk di

masyarakat tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di

Kota Pontianak. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

yaitu observasi, Wawancara dan teknik dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN

A. Keterampilan Komunikasi

Terdapat perbedaan keterampilan komunikasi antara masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi rendah dan ekonomi tinggi. Perbedaan terbesar yakni pendidikan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang memadai

membuat seseorang siap dalam memproses informasi seperti membaca, memahami, dan mengingat.

Dari hasil penelitian pun menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan beban kerja membuat seseorang akan terpengaruhi tentang bagaimana ia bereaksi tentang sebuah topik baru.

Mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lumayan tapi

memiliki beban kerja yang lebih tinggi akan kesulitan mencari

informasi dikarenakan terlalu letih dan sulitnya membagi waktu. Hal ini

membuatnya mencari jalan pintas dengan menanyakan atau menunggu

informasi datang. Berbeda dengan mereka yang memiliki tingkat

pendidikan yang lumayan tinggi dan beban kerja yang lebih rendah akan

mudah memanajemen waktunya untuk sebentar mencair informasi

tentang suatu topik terutama peraturan sistem zonasi yang baru.

B. Jumlah Informasi

Terdapat perbedaan antara jumlah informasi yang disimpan atau latar belakang ilmu

pengetahuan yang diperoleh sebelumnya. Masyarakat yang berasal dari status sosial ekonomi lebih tinggi mungkin sudah mengetahui sebuah topik melalui pendidikan, atau mungkin mereka mengetahui lebih banyak tentang topik itu melalui pelajaran yang didapat sebelumnya.

Terkait aspek jumlah informasi, informan dengan status sosial ekonomi menengah kebawah mengatakan tidak mudah mengingat peraturan sistem zonasi yang baru walaupun sudah dijelaskan dengan pihak sekolah, hal ini membuat opini yang disebarkan oleh informan banyak yang berisi informasi tidak lengkap. Sedangkan informan yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas mengatakan bahwa mudah bagi mereka untuk mengingat peraturan tersebut sehingga opini yang dikeluarkan cukup lengkap dikarenakan ingatan mereka yang kuat.

C. Kontak Sosial

Orang dari status sosial ekonomi lebih tinggi mempunyai lebih banyak hubungan sosial yang

relevan. Artinya, masyarakat berstatus ekonomi yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan orang-orang yang juga terekspos pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan mungkin terlibat dalam diskusi mengenai topik-topik semacam itu dengan mereka. Oleh karena itu informasi yang didapat lebih akurat dan tidak berat sebelah.

Pada aspek kontak sosial yang relevan dapat disimpulkan bahwa para informan menengah ke bawah melakukan diskusi, akan tetapi mereka mendiskusikannya dengan orang-orang yang tidak begitu mengerti, hal ini membuat opini-opini yang berisi informasi kurang lengkap semakin disebar luaskan hingga menimbulkan kebingungan diantara mereka. Sedangkan mereka yang berstatus ekonomi menengah ke atas memilih berdiskusi hanya jika ditanyai dan satu informan memilih untuk tidak mendiskusikannya sama sekali. Hal ini membuat mereka tidak menyebarkan opininya dengan mudah karena mereka merasa tidak banyak memiliki relasi yang

mengerti betul dengan sistem zonasi.

D. Penerimaan Daya Ingat Selektif

Masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi lebih baik dalam melakukan terpaan selektif, penerimaan, dan retensi atas informasi yang ada. Akan tetapi orang dari status sosial ekonomi rendah mungkin tidak menemukan informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang tepat dengan masyarakat atau berita-berita ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai atau sikap-sikap mereka, atau mereka mungkin tidak tertarik dengan informasi seperti itu.

Pada aspek penerimaan daya ingat selektif bisa disimpulkan, informan dengan status sosial ekonomi ke bawah tidak memiliki daya ingat selektif yang baik, oleh karenanya opini mereka dicampur-aduk dengan topik lainnya dikarenakan mereka kurang pandai memilih topik yang relevan dalam ingatan mereka. Sedangkan opini informan yang berstatus sosial ekonomi ke atas relevan dengan sistem zonasi dikarenakan mereka pandai

memilih topik yang tepat untuk mendukung opini mereka.

E. Media Massa

Keadaan Sifat dari sistem media massa itu sendiri disesuaikan dengan orang dari status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Banyak berita mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat dan ilmu pengetahuan terbit dalam media cetak, dan media cetak berorientasi pada minat dan selera orang-orang dari status yang lebih tinggi. Hal ini membuat orang yang berstatus ekonomi lebih rendah kurang tertarik dengan informasi yang dipublikasikan media.

Dari hasil penelitian di atas tentang bagaimana media massa mempengaruhi opini para informan tentang sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah. Didapatkan bahwa informan dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah tidak peduli dengan media massa yang memberitakan tentang sistem zonasi sehingga opini mereka tidak dipengaruhi oleh pemberitaan di

media massa. Sedangkan dari informan yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas dua diantaranya dipengaruhi oleh media massa opininya secara langsung. Sedangkan satu informan tidak dipengaruhi secara langsung. Oleh karenanya opini mereka mengikuti dari pemberitaan media massa.

5. PENUTUP

1) Kesimpulan

Pada bagian akhir ini peneliti menyimpulkan hasil temuan di lapangan, dari serangkaian tahap penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan penyebab munculnya opini pro dan kontra tentang penerapan sistem zonasi PPDB tahun ajaran 2019/2020 pada kalangan orang tua di Kecamatan Pontianak Timur dikarenakan terdapat perbedaan yakni banyaknya informasi yang masuk maupun yang diolah oleh para informan. Informan berstatus sosial ekonomi rendah cenderung acuh tak acuh dengan informasi yang ada sehingga informasi yang didapat simpang siur sehingga opini yang dikeluarkan

banyak salah paham. Sedangkan informan berstatus sosial ekonomi tinggi cukup aktif dan sangat antusias terhadap informasi mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sehingga informasi yang didapat akurat dan opini yang dikeluarkan dan dibincangkan kepada orang lain sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

2) Saran

Diharapkan orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya sekolah untuk terlebih dahulu mencari informasi yang sejelas-jelasnya dari sumber dan media yang terpercaya. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengemas informasi yang ingin disampaikan kepada orang tua agar bisa dengan mudah dipahami oleh semua kalangan orang tua agar tak terjadi kesalahpahaman.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. 1993. "Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi." Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. 2005. Metode penelitian kualitatif: aplikasi praktis

- pembuatan proposal dan laporan penelitian. Malang: UMM Press
- Koentjaraningrat, 1979. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru,
- Lexy, Moleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 1989. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. Bandung: Remadja Karya W
- Nurudin. 2007. "Pengantar Komunikasi Massa." Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2008, Metodologi Penelitian Kesehatan. Edisi revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Olli, Helena dan Novi Erlita, Opini Publik. PT Indeks, Jakarta, 2011
- Ollien, Clarice N, George A. Donohue and Phillip J. Tichenor. 1983. "Structure, Communication and Social Power: Evolution of the Knowledge Gap Hypothesis", Mass Communication Review Yearbook, eds. Ellen Wartella and D. Charles Whitney (ed), Volume 4, Beverly Hill, London: Sage Publications,
- Primasiwi, Tika. 2011. Pembentukan Opini Publik Tentang Citra Polisi Sebagai Dampak Berita Tindak Kriminal Polisi di Media Massa. Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Skripsi
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Santoso, Sastropoetro. 1990. Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak dalam Komunikasi Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi, Jakarta, Bulan Bintang
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tichenor, P.J., Donohue, G.A. and Olien, C.N. (1970). Mass Media Flow and Differential Growth in Knowledge, Public Opinion Quarterly 34: Columbia University

